

## Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone

### *The Role of BUMDes in Enhancing Farmers' Welfare and Food Security in Molutabu Village, Kabila Bone District*

Rudy Harold<sup>1\*)</sup>, Mohammad Mantali<sup>2)</sup>, Fitrah Bau<sup>3)</sup>, Mohammad Andre Septiyanto Djafar<sup>4)</sup>, Ismail Y. Ali<sup>5)</sup>, Siti Ariyanti Birahim<sup>6)</sup>, Irene<sup>7)</sup>, Yayun Wandari Bumulo<sup>8)</sup>, Silfatul Marwah Antau<sup>9)</sup>, Nova Olga Octavia Medellu<sup>10)</sup>, Abd Rajid A Hi Ahmad<sup>11)</sup>, Vanes Nusu<sup>12)</sup>, Rifki Umar<sup>13)</sup>, Yan Ali<sup>14)</sup>, Erick Bahtiar Polamolo<sup>15)</sup>, Mirnawati Duslan<sup>16)</sup>

<sup>1-16</sup>Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

\*Corresponding Author: [rudy\\_harold@ung.ac.id](mailto:rudy_harold@ung.ac.id)

#### ABSTRAK

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar lingkungan kampus. Salah satu program unggulannya, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Membangun Desa, dirancang untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan desa secara berkelanjutan. Pada tahun 2025, Kegiatan KKN-MBKM Universitas Negeri Gorontalo di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, fokus pada penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penyusunan rencana kerja dan pendampingan pelaksanaan program utama berupa pembibitan cabai. Pelatihan untuk pengurus BUMDes dilaksanakan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan materi yang mencakup identifikasi masalah, dasar hukum, peran, jenis usaha, aspek pendanaan, pengelolaan pembukuan, dan revitalisasi BUMDes. Melalui pendekatan P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa), mahasiswa menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pengurus serta aparat desa. Hasilnya, lebih dari 200 bibit cabai berkualitas berhasil dikembangkan dan ditanam di lahan BUMDes, sebagai langkah penguatan ketahanan pangan desa. Selain itu, program ini juga mencakup perbaikan fasilitas desa, pelatihan keberlanjutan program BUMDes, dan mempererat hubungan antara mahasiswa, warga, serta pemerintah desa. Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** BUMDes, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat.

#### ABSTRACT

The Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program, initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia, provides students with opportunities to gain learning experiences outside the university environment. One of its flagship programs, the Community Service for Village Development (KKN Membangun Desa), is designed to encourage students' involvement in sustainable village development. In 2025, the KKN-MBKM program from Universitas Negeri Gorontalo in Molutabu Village, Kabila Bone District, focused on strengthening the capacity of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) through the development of a work plan and assistance in implementing its main program, which involved chili seedling production. Training for BUMDes management was conducted in collaboration with the Department of Community and Village Empowerment, covering topics such as problem identification, legal foundations, roles, types of businesses, financial aspects, bookkeeping management, and revitalization of

*BUMDes. Using the Participatory Planning for Village Community Development (P3MD) approach, students conducted training, mentoring, and Focus Group Discussions (FGDs) with village administrators and officials. As a result, more than 200 high-quality chili seedlings were successfully developed and planted on BUMDes land, strengthening the village's food security. Additionally, the program included other activities such as village infrastructure improvements, training on the sustainability of BUMDes' work programs, and fostering closer relationships between students, the community, and local government. This series of activities aims to strengthen the local economy and enhance the welfare of the village community sustainably.*

**Keywords:** BUMDes, food security, community empowerment

## PENDAHULUAN

Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki tanggung jawab untuk mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Di Indonesia, desa berperan sebagai tempat bermukim sekaligus pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai satuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini didasarkan pada asal-usul dan adat yang diakui serta dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 12 (Jamaludin, 2015).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang dibentuk oleh desa, baik secara sendiri maupun bersama desa lainnya, dengan tujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan, serta menjalankan berbagai usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMDes mencakup sektor ekonomi dan layanan umum yang dikelola secara mandiri. Terdapat perbedaan antara aset desa dan aset BUMDes. Aset desa adalah barang milik desa yang bersumber dari kekayaan asli desa atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan aset BUMDes meliputi kekayaan yang dimiliki oleh BUMDes, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai secara finansial, berwujud maupun tidak. Aset ini diharapkan menjadi sumber ekonomi yang memberikan manfaat atau keuntungan (Kurniawan et al., 2022).

BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di pedesaan, namun saat ini, BUMDes menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah arus investasi besar dari dalam dan luar negeri yang semakin intensif. Desa sering menjadi sasaran pengembangan usaha, sementara kemampuan permodalan BUMDes masih tergolong terbatas, jika dibandingkan dengan perusahaan swasta besar. Ini menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara BUMDes dan perusahaan besar, meskipun desa memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, BUMDes diharapkan dapat melindungi desa dari dominasi korporasi besar dan menjadi penggerak ekonomi desa melalui kepemilikan usaha oleh masyarakat desa itu sendiri (Ramadana et al., 2013).

Potensi BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri milik warga desa memiliki peluang besar untuk dikembangkan di masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman yang lebih sistematis dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pedoman ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang akan menjaga kesejahteraan sosial serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada di tingkat daerah. Secara hukum, dasar pembentukan peraturan daerah tentang BUMDes mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 Ayat (1), yang memberi kewenangan kepada desa untuk mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada, yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Nursetiawan, 2018).

Pembangunan wilayah pedesaan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sektor pertanian menjadi salah satu sumber daya ekonomi utama. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah dengan memaksimalkan peran BUMDes dalam mengembangkan program-program yang mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan taraf hidup petani.

Dantika dan Yanuardi (2013) dalam penelitian yang dirujuk oleh Chintary dan Lestari (2016) menyatakan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan utama untuk mendukung dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Aktivitas yang dimaksud bisa berupa usaha yang berkembang sesuai dengan tradisi dan budaya lokal, maupun kegiatan ekonomi yang diselenggarakan melalui program atau proyek yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau daerah. Sebagai entitas usaha desa, BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik dalam aspek ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, maupun pengembangan sumber daya manusia.

Desa Molutabu, yang terletak di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, memiliki potensi alam yang mendukung sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama bagi warganya. Berkat letak geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Molutabu memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomian berbasis pertanian. Dalam konteks ini, keberadaan BUMDes sangat penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang mendukung ketahanan pangan, yang menjadi fokus utama dari BUMDes di Desa Molutabu.

Sektor pertanian di Desa Molutabu memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan desa, terutama melalui program pembibitan cabai yang menjadi bagian dari program kerja BUMDes. Namun, pengembangan sektor ini masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Pertama, keterampilan pengurus BUMDes dalam hal teknik pembibitan cabai masih terbatas, sehingga pelaksanaan program-program BUMDes tidak berjalan secara konsisten dan belum memberikan hasil yang optimal. Kedua, partisipasi masyarakat dalam berbagai program pertanian yang telah dirancang oleh pemerintah desa masih rendah, yang menyebabkan inisiatif yang ada tidak memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan warga desa. Ketiga, peran BUMDes dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam pengelolaan pascapanen, distribusi hasil pertanian, dan pemberdayaan petani lokal, masih belum maksimal. Keterlibatan BUMDes yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kemampuan manajerial. Keempat, pengurus BUMDes juga masih kurang memahami pentingnya penyusunan dokumen rencana kerja yang sistematis, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Dokumen ini sangat penting sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan usaha BUMDes secara terarah, efektif, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat desa.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan bagi pengurus BUMDes, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mendukung program pertanian desa. Dengan demikian, potensi besar sektor pertanian di Desa Molutabu dapat dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Membangun Desa kami difokuskan pada peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dalam ketahanan pangan melalui pengembangan program pembibitan cabai. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dan masyarakat dalam mengelola pembibitan cabai, serta memperkuat program kerja BUMDes yang berfokus pada ketahanan pangan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini mengimplementasikan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa), yang

meliputi serangkaian kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan pemantauan. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, P3MD bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada kebijakan, program, dan kegiatan yang disertai pendampingan, yang disesuaikan dengan permasalahan utama serta kebutuhan prioritas masyarakat desa. P3MD merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd), yang sebelumnya bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program PNPM MPd telah terbukti berhasil dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, membangun infrastruktur desa, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan desa, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat desa (Hutauruk, 2022).

Dalam rangka melaksanakan program KKN-MBKM ini, kami sebagai mahasiswa menjalankan pelatihan pengembangan sumber daya manusia untuk pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelatihan ini mencakup beberapa materi penting, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas BUMDes.
2. Peran BUMDes dalam mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes).
3. Inovasi dalam program kerja BUMDes.
4. Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan pendek untuk BUMDes.

Pelatihan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, kami juga terlibat secara aktif dalam penyusunan dokumen rencana kerja BUMDes. Kegiatan ini dilakukan melalui komunikasi intensif bersama pemerintah desa dan pengurus BUMDes untuk memastikan bahwa BUMDes memiliki arah kerja yang terstruktur dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dalam konteks ketahanan pangan, kami turut mendampingi pelaksanaan program utama BUMDes, yaitu pembibitan cabai, yang dilaksanakan bersama dengan Balai Penyuluhan Pertanian. Sebanyak sekitar 200 bibit cabai berkualitas berhasil dibudidayakan dalam program ini.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, kami mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui beberapa pendekatan yang telah dirancang, antara lain:

1. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) untuk mendalami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan memberikan solusi berbasis partisipasi.
2. Pendampingan langsung bagi kelompok tani dan pengurus BUMDes agar mereka memiliki keterampilan praktis dalam mengelola program-program pertanian dan BUMDes secara efektif.
3. Evaluasi rutin untuk menilai dampak serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi program dan mencari cara untuk memperbaiki serta menyempurnakan kegiatan yang berjalan.

Metode ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terintegrasi dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Negeri Gorontalo telah dilaksanakan di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selama sekitar empat bulan di lapangan. Sebelum mahasiswa

KKN MBKM diterjunkkan, mereka terlebih dahulu mengikuti sesi pembekalan atau coaching yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bersama dosen dari jurusan dan program studi terkait. Tujuan dari pembekalan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada mahasiswa mengenai teknis pelaksanaan kegiatan KKN MBKM di lapangan, termasuk strategi pendekatan kepada masyarakat dan pemetaan potensi desa.

Materi coaching mencakup beberapa hal penting, seperti metode untuk mengidentifikasi permasalahan di desa, penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan kondisi lapangan, serta teknik komunikasi yang efektif dengan perangkat desa dan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan pengetahuan tentang etika sosial dan budaya setempat serta prosedur administrasi yang wajib dipatuhi selama pelaksanaan program. Pembekalan ini bertujuan agar mahasiswa dapat merancang program kerja yang lebih terarah, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Molutabu.

Pendekatan yang dilakukan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan program KKN MBKM, sehingga kehadiran mahasiswa tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan desa. Melalui program ini, mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, serta terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendukung desa dalam meraih kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan program KKN MBKM, sehingga kehadiran mahasiswa tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan benar-benar memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan desa. Melalui program ini, mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, dan terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendukung desa dalam meraih kemandirian serta kesejahteraan yang lebih baik.

### **Capaian Program KKN MBKM**

Pelaksanaan program KKN-MBKM di Desa Molutabu berhasil memberikan sejumlah capaian penting, terutama dalam peningkatan kapasitas desa. Salah satunya adalah penyusunan dokumen Rencana Program BUMDes, yang menjadi hasil utama dari kegiatan pelatihan sumber daya manusia bagi Badan Usaha Milik Desa. Melalui pelatihan ini, pengurus BUMDes memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya dokumen perencanaan untuk menunjang kelangsungan dan efektivitas program-program BUMDes ke depan. Selain itu, pelatihan yang dilaksanakan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Bone Bolango turut berkontribusi dalam peningkatan kemampuan pengurus BUMDes serta masyarakat desa dalam mengelola usaha dan aktivitas ekonomi yang ada di desa.

Program utama BUMDes, yaitu pembibitan cabai, berhasil diwujudkan melalui kerja sama yang erat dengan Balai Penyuluhan Pertanian. Program ini ditandai dengan pendistribusian bibit cabai berkualitas kepada pengurus BUMDes dan warga desa sebagai langkah awal untuk mendorong kemandirian pangan serta meningkatkan aktivitas budidaya pertanian di tingkat rumah tangga. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program yang melibatkan berbagai pihak—termasuk mahasiswa, pemerintah desa, pengurus BUMDes, pemuda desa, Dinas PMD, dan Balai Penyuluhan Pertanian—dapat memperkuat ketahanan pangan berbasis hortikultura secara berkelanjutan.

### **Kolaborasi Lintas Pihak dan Dampaknya**

Kerja sama lintas sektor ini membuktikan bahwa pembangunan sektor pertanian yang kuat dan mandiri hanya bisa terwujud melalui kolaborasi yang terintegrasi. Dalam pelaksanaan program di lapangan, kami selaku mahasiswa menjalankan berbagai kegiatan yang terdiri dari program utama, program pendukung, dan program tambahan. Ketiga program ini dirancang untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam

mengelola usaha pertanian, meningkatkan keterampilan teknis, serta mendukung pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Program pembibitan cabai, sebagai salah satu kegiatan utama, diharapkan dapat menjadi titik awal yang penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Dengan adanya program ini, masyarakat mulai menyadari potensi lokal yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam sektor pertanian. Kesadaran ini penting agar masyarakat desa dapat mengembangkan lebih banyak usaha berbasis sumber daya lokal, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui langkah yang terencana dengan baik dan kolaborasi antara berbagai pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi Desa Molutabu, baik dalam aspek ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Program Wajib**

#### **a. Pelatihan SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memegang peranan penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar BUMDes yang telah dibentuk dapat berfungsi secara maksimal, pengembangan dan pemberdayaan yang berkelanjutan sangat diperlukan. Pencapaian visi dan misi BUMDes hanya akan tercapai apabila pengelolaan dilakukan secara profesional dan terarah.

BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas berbagai permasalahan desa, tetapi juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa. Keberadaannya mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi desa secara kreatif dan inovatif, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja lokal di wilayah pedesaan (Agunggunanto et al., 2016).

Pemerintah telah menginisiasi program pemberdayaan desa melalui pembentukan BUMDes, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika di tingkat nasional terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka di tingkat desa hadir BUMDes. Pasal 1 ayat 6 dalam UU Desa menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa, yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung. Tujuan utama BUMDes adalah untuk mengelola aset, menyediakan layanan, dan menjalankan berbagai usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Suryaningtyas, 2018).

Keberadaan BUMDes sangat penting untuk mendukung peningkatan ekonomi desa. BUMDes berperan sebagai sarana bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi secara proporsional di tingkat desa. Program pengabdian masyarakat melalui pelatihan pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pengurus BUMDes dan aparat desa dalam mengelola dana BUMDes secara efektif, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif jika kualitas pengelolaan BUMDes dapat diperbaiki (Nursyamsu dan Kurniadi, 2020).

Pelatihan sumber daya manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diselenggarakan oleh mahasiswa MBKM Terintegrasi KKN dari Jurusan Sosiologi, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini mengangkat tema “Pengembangan Kapasitas BUMDes Desa Molutabu Menuju Lembaga Keuangan Desa yang Mandiri, Profesional, dan Akuntabel.” Pelatihan sumber daya manusia (SDM) bagi pengurus BUMDes ini diselenggarakan oleh mahasiswa

MBKM Terintegrasi KKN dari Jurusan Sosiologi, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini mengangkat tema “Pengembangan Kapasitas BUMDes Desa Molutabu Menuju Lembaga Keuangan Desa yang Mandiri, Profesional, dan Akuntabel.” Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membentuk pola pikir kewirausahaan sosial yang berorientasi pada manfaat jangka panjang, bukan hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh. Peserta kegiatan ini meliputi pengurus BUMDes (ketua, sekretaris, bendahara), perwakilan pemerintah desa, serta tokoh masyarakat atau pemuda desa yang terlibat dalam kegiatan usaha di desa.

Pelaksanaan pelatihan SDM BUMDes sering kali menemui sejumlah hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, yang menghambat optimalisasi penyelenggaraan pelatihan, baik dari segi penyediaan fasilitas, kualitas narasumber, maupun durasi pelatihan. Jadwal pelatihan yang seringkali tidak sinkron dengan kesibukan masyarakat desa juga berdampak pada rendahnya tingkat kehadiran peserta.

Faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan pelatihan adalah minimnya dukungan dari pemerintah desa atau lembaga terkait, baik dalam bentuk bantuan logistik maupun pendampingan setelah pelatihan. Akibatnya, materi yang disampaikan selama pelatihan sulit diterapkan secara efektif dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan pendampingan dan monitoring pasca-pelatihan agar peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dengan lebih optimal dan sesuai dengan kondisi di lapangan.



**Gambar 1.** Persiapan Pelatihan



**Gambar 2.** Pelatihan inti

#### **b. Penyusunan Dokumen Program Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek BUMDes**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa BUMDes wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut dalam waktu paling lambat satu tahun setelah diberlakukan pada 1 Februari 2021. Salah satu aspek penting yang harus disesuaikan adalah status BUMDes yang sebelumnya hanya berbentuk badan usaha, kini berubah menjadi badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha. Dengan status yang baru ini, jangkauan operasional BUMDes menjadi lebih luas dan lebih kompleks. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis BUMDes (RSB) sangat penting untuk memberikan pedoman dan arah dalam pengelolaan usaha di tingkat desa.

Rencana Strategis BUMDes (RSB) berfungsi sebagai kerangka perencanaan dan penetapan kebijakan. RSB ini memiliki beberapa kegunaan penting, antara lain:

1. Sebagai kesepakatan kinerja sekaligus dasar untuk menilai kinerja finansial dan nonfinansial.
2. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes.
3. Sebagai pedoman bagi pengelola BUMDes untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan RSB ini perlu melibatkan pertemuan antara penasehat, pengawas, dan pengelola BUMDes guna melakukan analisis dan diskusi bersama untuk merumuskan rencana kerja yang lebih terarah (Suryanto, 2019, dalam penelitian Sunardi et al., 2022).

Program kerja BUMDes merupakan dokumen pendukung yang berisi beberapa komponen penting, yaitu:

1. Profil BUMDes, mencakup visi, misi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan kepemilikan modal.
2. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya, yang mencakup analisis kondisi internal dan eksternal.
3. Rencana aksi, yang meliputi tujuan usaha, strategi, kebijakan, dan langkah-langkah yang akan diambil.
4. Indikator utama untuk mengukur kinerja, terutama bagi petugas lapangan.
5. Rencana kerja sama, baik dalam bidang usaha maupun di luar bidang usaha.
6. Rencana kegiatan beserta kebutuhan yang diperlukan, sebagaimana diatur dalam PP RI Nomor 3 Tahun 2021 (Sunardi et al., 2022).

Penyusunan program kerja yang menyeluruh memungkinkan BUMDes untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efektivitas kegiatan usahanya. Evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko, sementara kerja sama strategis dapat memperluas jejaring, memperkuat modal sosial, serta mendukung kesinambungan operasional usaha.

Dokumen-dokumen penting yang harus disusun dan dimiliki oleh BUMDes meliputi berita acara hasil musyawarah desa, peraturan desa, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan rencana kerja program. Dokumen-dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga menjadi dasar hukum dan pedoman untuk mengelola BUMDes secara profesional. Melalui pembinaan yang diberikan kepada pengurus BUMDes dan perangkat desa, diharapkan kemampuan mereka dalam menyusun dokumen pendukung BUMDes dapat berkembang secara signifikan (Fahmi et al., 2023).

Penyusunan dokumen-dokumen penting ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan BUMDes dalam mengambil keputusan, melaksanakan kegiatan usaha, dan melakukan evaluasi kinerja BUMDes dalam periode tertentu. Dokumen rencana kerja ini akan menjadi dasar operasional bagi pengurus BUMDes dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Penyusunan dokumen program kerja jangka panjang dan jangka pendek BUMDes merupakan salah satu hasil dari kegiatan Pelatihan SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diselenggarakan oleh mahasiswa MBKM Terintegrasi KKN. Dokumen ini disusun berdasarkan inovasi program kerja BUMDes yang dikembangkan bersama mahasiswa dalam proses penyusunannya. Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk memudahkan pengurus BUMDes Desa Molutabu dalam merancang rencana program kerja yang terstruktur, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Sebagai keluaran dari pelatihan SDM BUMDes, mahasiswa membantu BUMDes menyusun dokumen rencana program dan turut mendampingi implementasi program utama BUMDes, yakni kegiatan pembibitan cabai. Proses awal penyusunan dokumen dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan pengurus BUMDes dan pemerintah desa untuk mencapai kesepakatan dalam merancang program kerja BUMDes.

Namun, proses penyusunan dokumen program kerja BUMDes, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, seringkali menghadapi berbagai kendala yang cukup rumit. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman para pengelola BUMDes terkait pentingnya perencanaan strategis yang terukur dan sistematis. Hal ini menyebabkan dokumen yang dihasilkan sering kali tidak berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan dan potensi nyata desa, sehingga kurang sesuai dengan



situasi di lapangan.

Selain itu, minimnya pendampingan teknis dari tenaga ahli berpengalaman dalam manajemen usaha desa menjadi faktor utama yang membuat dokumen perencanaan hanya menjadi formalitas, bersifat umum, dan tidak dapat dijadikan pedoman operasional yang efektif. Akibatnya, meskipun program kerja sudah disusun, pelaksanaannya sering kali tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan tidak efektif untuk mendukung pengembangan usaha BUMDes maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi pengurus BUMDes dan pendampingan intensif oleh profesional, agar dokumen program kerja yang dihasilkan lebih realistis, aplikatif, dan benar-benar selaras dengan kebutuhan serta potensi desa. Dengan demikian, peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa dapat terwujud secara maksimal.



**Gambar 2.** Wawancara ketua Bumdes



**Gambar 3.** Penyusunan Dokumen Program Bumdes

### c. Pendampingan Pembibitan Cabai

Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia (Cahyani & Saputra, 2021; Laga, 2021, sebagaimana dikutip dalam Padmaningrum et al., 2022). Pernyataan ini menegaskan bahwa cabai memiliki peran strategis di Indonesia karena dua faktor utama: tingginya nilai ekonomi dan luasnya tingkat konsumsi di kalangan masyarakat. Dari perspektif ekonomi, cabai memiliki peluang besar sebagai sumber pendapatan bagi petani, karena permintaan yang stabil dan cenderung meningkat, baik untuk keperluan rumah tangga, industri makanan, maupun pasar ekspor. Selain itu, harga cabai yang sering berfluktuasi dapat memengaruhi angka inflasi bahan pangan, yang semakin menegaskan pentingnya komoditas ini dalam perekonomian nasional.

Cabai rawit, yang dalam istilah Latin dikenal sebagai *Capsicum annuum L.*, adalah tanaman hortikultura dari famili *Solanaceae* yang memiliki nilai ekonomi signifikan (Depi, 2022; Syukur et al., 2012 sebagaimana dikutip Asfiyak & Fakhrudin, 2023). Cabai berasal dari benua Amerika, khususnya wilayah Peru, dan menyebar ke negara-negara di benua Amerika, Eropa, serta Asia, termasuk Indonesia. Tanaman cabai memiliki beragam jenis pertumbuhan serta bentuk buah, dengan diperkirakan ada sekitar 20 spesies yang mayoritas hidup di negara asalnya. Masyarakat umumnya hanya mengenal beberapa jenis cabai, yaitu cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, dan paprika. Tanaman cabai merupakan salah satu jenis sayuran buah dengan potensi bisnis yang menjanjikan. Tingginya permintaan akan cabai sebagai kebutuhan pokok masyarakat menjadikannya komoditas yang sangat prospektif (Asfiyak & Fakhrudin, 2023).

Cabai adalah salah satu jenis sayuran yang banyak disukai masyarakat. Sayuran ini dikenal karena cita rasa pedas dan aroma khasnya, yang bagi sebagian orang dapat meningkatkan selera makan. Sebagai bahan masakan yang hampir selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, permintaan cabai

diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya perekonomian nasional (Ripangi, 2012, sebagaimana dikutip dalam Yusuf et al., 2018).

Menurut Sopacua dan Koibur (2017), sebagaimana dikutip dalam Asfiyak dan Fakhruddin (2023), program penanaman seribu bibit cabai bertujuan untuk membantu menstabilkan perekonomian masyarakat. Salah satu keunggulan tanaman cabai yang membuatnya diminati petani adalah kemampuannya untuk tumbuh sepanjang tahun, tanpa bergantung pada musim tertentu. Cabai dapat dibudidayakan baik pada lahan basah maupun kering, sehingga ketersediaannya di pasar atau swalayan hampir selalu terjamin. Namun, menanam cabai pada musim hujan memiliki risiko yang lebih besar karena tanaman ini rentan terhadap curah hujan yang tinggi. Genangan air di lahan tanam dapat menyebabkan daun cabai rontok dan memicu serangan penyakit pada akar.

Pendampingan dalam Pembibitan Cabai merupakan salah satu program pendukung dalam bidang sosiologi yang dijalankan oleh mahasiswa, yang selaras dengan program utama BUMDes dalam pembibitan cabai. Mahasiswa berinisiatif untuk menjalin kerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian untuk melaksanakan kegiatan pembibitan. Selama tiga minggu, proses pembibitan cabai ini didampingi oleh koordinator penyuluhan pertanian. Bibit cabai yang ditanam dalam media polybag kini telah tumbuh dengan baik dan siap didistribusikan kepada pengurus BUMDes serta masyarakat setempat.

Pembibitan merupakan tahap awal dalam proses budidaya tanaman yang harus dilakukan dengan menghasilkan bibit berkualitas baik (Supristiwendi & Safni, 2017 dalam Adriani et al., 2025). Untuk menunjang keberhasilan dalam budidaya, penyediaan bibit yang berkualitas sangat penting. Namun, tidak semua petani mampu menghasilkan bibit unggul. Oleh karena itu, kegiatan pembibitan perlu memperhatikan berbagai aspek, seperti pemilihan benih yang tepat, ketersediaan fasilitas persemaian, lokasi yang sesuai, teknik penyemaian yang benar, pemilihan media tanam, pemupukan yang optimal, serta pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit (Irawan et al., 2020 dalam Adriani et al., 2025).

Program ini disusun dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan pengurus BUMDes dan masyarakat desa dalam mengelola usaha pembibitan cabai secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengelola BUMDes dan warga tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menguasai keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa yang terlibat memberikan pendampingan teknis secara menyeluruh, mulai dari menyiapkan media tanam yang sesuai standar, melakukan penyemaian benih cabai untuk menghasilkan bibit berkualitas, merawat bibit secara rutin agar tumbuh optimal, hingga memindahkan bibit ke lahan tanam yang telah dipersiapkan. Selain itu, pendampingan ini juga disertai dengan edukasi tentang pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan budidaya, penerapan pola tanam hortikultura yang tepat, serta teknik perawatan tanaman yang ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem setempat.

Teknik yang diajarkan tidak hanya berfokus pada aspek budidaya secara teknis, tetapi juga mencakup perencanaan usaha agar kegiatan pembibitan cabai dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat desa. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif, program ini diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian warga dalam mengelola usaha pertanian, sekaligus memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Keberhasilan pelaksanaan program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan masyarakat, tetapi juga mendukung ketahanan pangan desa serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.



**Gambar 4.** Pembibitan Bersama Balai Penyuluhan Pertanian



**Gambar 5.** Penyerahan Bibit Rica pada pengurus BUMDes

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan MBKM Terintegrasi KKN Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2025 di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Program Kerja Membangun Desa: Program yang ada di Desa Molutabu terdiri dari program wajib, program penunjang, dan program tambahan yang berhasil dijalankan dengan baik.
2. Terwujudnya Program KKN MBKM: Pelatihan sumber daya manusia (SDM) bagi pengurus BUMDes Desa Molutabu berhasil meningkatkan kapasitas mereka dalam mewujudkan program kerja BUMDes yang dapat meningkatkan dan memajukan perekonomian desa.
3. Peningkatan Pemahaman Pengurus BUMDes tentang Keberlanjutan Program: Pengurus BUMDes Desa Molutabu kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keberlanjutan program yang akan dijalankan, sehingga lebih siap untuk mengelola program-program secara efektif.
4. Terwujudnya Program Pembibitan Cabai: Pembibitan cabai berhasil dikembangkan sebagai salah satu program utama BUMDes Desa Molutabu, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian desa.
5. Program Perbaikan dan Pembuatan Atribut Desa: Pembuatan atribut desa, termasuk program-program untuk kesejahteraan masyarakat, serta terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik antara mahasiswa KKN MBKM, masyarakat, dan pemerintah, turut mendukung terciptanya suasana yang harmonis dan saling mendukung dalam pembangunan desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo bapak Prof. Eduart Wolok.
2. LPPM Universitas Negeri Gorontalo, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam proses kegiatan ini.
3. Balai Penyuluhan Pertanian, Pemerintah Desa Molutabu, serta Karang Taruna, yang telah mendukung dan berkolaborasi dengan kami dalam menjalankan program-program yang bermanfaat untuk desa.
4. Masyarakat Desa Molutabu, yang telah dengan antusias dan penuh semangat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, N. S., & Arifin, U. H. (2025). Pendampingan kelompok tani rica dalam Kampung Marimoi Nyinga Kelurahan Foramadiahi. *Madaniya*, 6(1), 114–121.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67–81.
- Asfiyak, K., & Fakhrudin, S. (2023). Program penanaman seribu bibit cabai sebagai upaya menstabilkan perekonomian masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 451–458.
- Chintarydan, V. Q., & Lestar, A. W. (2016). Peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 59–63.
- Fahmi, M., Afrida, M. A., Masdaini, E., & Kholillah, R. G. (2023). Pendampingan penyusunan dokumen pendukung pendaftaran badan hukum Badan Usaha Milik Desa Al-Ikhlas Desa Meranjat II Indralaya Selatan. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Mengabdi*, 2(1), 40–46.
- Hutauruk, A. (2022). Efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) di Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 8(4), 183–187.
- Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi perdesaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9). Retrieved from [https://digilib.uinsgd.ac.id/3651/1/Kaper-Sosiologi-Perdesaan\\_SOSILOGI-PERDESAAN\\_merged.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/3651/1/Kaper-Sosiologi-Perdesaan_SOSILOGI-PERDESAAN_merged.pdf)
- Kurniawan, B. E., Saputri, L. R., Aini, L. N., Zeli, A., & Rohim. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.37849/mipi.v5i1.294>
- Nursyamsu, R., & Kurniadi, E. (2020). Pelatihan peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibuang Kabupaten Kuningan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 135–142.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi BUMDes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Padmaningrum, D., Suminah, U., Utami, B. W., Ihsaniyati, H., & Widiyanti, E. (2022). Pemberdayaan kelompok tani melalui budidaya cabai sebagai upaya peningkatan pendapatan petani lahan kering di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(1), 158–167.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076.
- Roni, N., & Kurniadi, E. (2020). Pelatihan peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibuang Kabupaten Kuningan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 135–142.
- Suryaningtyas, D. (2018). Pelatihan manajemen tentang Badan Usaha Milik Desa bagi perangkat desa dan kelompok kerja. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 181–187.
- Sunardi, D., Djazuli, A., Gusmiatun, & Herudiansyah, G. (2022). Pendampingan penyusunan dokumen rencana program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. *International Journal of Community Engagement*, 2(2), 97–102.
- Yusuf, F., Rauf, A., & Halid, A. (2018). Strategi pengembangan usahatani cabai rawit di Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 2(2), 1–13.